

KONSEP PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR TAGIHAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH SWASTA

Oleh:

Ita Yunita¹, Fia BIRTHA² Al Sabet³

STEBI Syaikhona Kholil Sidogiri Pasuruan

Fia.birtha@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan konsep pengendalian internal sebagai upaya meminimalisir tagihan biaya pendidikan pada sekolah swasta. Penelitian ini berawal dari hasil observasi yang telah dilakukan dan menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan merupakan salah satu masalah bangsa yang belum dapat ditemukan solusinya secara tuntas. Jika kita mencermati dan ikuti perkembangan pendidikan khususnya dalam hal biaya pendidikan sampai saat ini, biaya tersebut dirasakan semakin mahal. Terlebih lagi, dari kalangan kurang mampu semakin tidak menentu kondisi perekonomiannya dari hari ke hari. Kemudian yang menjadi dasar hukum dalam mendirikan sekolah dengan background agama atau sosial mengacu pada Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Artikel ilmiah ini menggambarkan bahwa upaya pengendalian tagihan yang selama ini menjadi

A. PENDAHULUAN

Pendidikan pada zaman modern ini adalah kebutuhan yang sangat penting bagi hampir sebagian masyarakat di berbagai tempat termasuk di berbagai belahan dunia, karena dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan dirinya sehingga mampu menjadi manusia yang mempunyai kualitas dan unggul. Pendidikan di Indonesia merupakan program yang dibangun pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas serta mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari Negara lain. Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan mampu memberi kemajuan yang baik untuk Indonesia dalam pengelolaan berbagai segi. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan landasan hukum dan penegasan sikap pemerintah terhadap reformasi sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan, pembiayaan sebagai faktor pendukung. Proses belajar mengajar akan terlaksana berjalan secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang

telah ditentukan sesuai dengan perencanaan. Senada disampaikan oleh Fatah (2006) bahwa pembiayaan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional, dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan proses belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan kemampuan profesional guru, administrasi sekolah dan pengawasan.

Biaya pendidikan merupakan keseluruhan pengorbanan pembiayaan yang dikeluarkan oleh konsumen (orang tua siswa atau siswi) untuk keperluan selama menempuh pendidikan dari awal sampai berakhirnya pendidikan. Baik itu hanya biaya gedung, registrasi dan tiap semester, biaya sumbangan gedung, dana kesejahteraan dan fasilitas siswa. Biaya pendidikan merupakan cerminan dari salah satu ciri sekolah unggul karena model sekolah unggul menurut Austin (1979:23) bahwa salah satu karakteristik sekolah unggul adalah memiliki pengembangan program dan perencanaan pengajaran yang baik, maka untuk mengembangkannya diperlukan dana yang dapat mengawal keterlaksanaan suatu program. Apabila dalam perencanaan biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab orang tua terjadi penunggakan maka berdampak pada terhambatnya tujuan sekolah dalam proses pengembangan peserta didik dan program – program pengajaran yang akan direncanakan. (Fauzi, 2017).¹ Hal ini sesuai dengan aplikasi dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

MBS merupakan satu bentuk agenda reformasi pendidikan di Indonesia. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan masyarakat global. Penegasan kembali semangat reformasi bidang pendidikan yakni dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia (UU) Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta beberapa kebijakan teknis yang mengatur pelaksanaan dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, baik pada tingkat departemen sampai pemerintah daerah dan sekolah selaku pemegang otonomi pendidikan pada tingkat paling bawah.

¹ Fauzi, M. A. (2017). Membangun Parenting Trust Sebagai Eksistensi Sekolah Unggul di Lingkungan Sekolah Berbasis Masyarakat (Studi : SMA Ulul Alb@b Taman Kabupaten Sidoarjo). *AT-TAJDID : Jurnal Ilmu Tarbiyah* , 271-293

Permasalahan pendidikan merupakan salah satu masalah bangsa yang belum dapat ditemukan solusinya secara tuntas. Jika kita mencermati dan ikuti perkembangan pendidikan khususnya dalam hal biaya pendidikan sampai saat ini, biaya tersebut dirasakan semakin mahal. Terlebih lagi, dari kalangan kurang mampu semakin tidak menentu kondisi perekonomiannya dari hari ke hari. Apalagi bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau disebabkan oleh karena hal yang lainnya. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah atau perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di tingkat pendidikan dasar misalnya, sekalipun Pemerintah telah memberi dana bantuan operasional sekolah (BOS), namun dianggap oleh sebagian besar masyarakat menengah ke bawah masih belum mencukupi untuk memenuhi biaya pendidikan, terutama biaya operasional pokok yang harus ditanggung oleh orangtua/wali peserta didik

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang esensial dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil guna. Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program.

Mengkaji biaya pendidikan, erat kaitannya dengan teori/konsep ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan pada hakikatnya merupakan “suatu kegiatan mengenai bagaimana manusia dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa uang, untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka untuk menciptakan berbagai jenis pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, watak, dan lain-lain, terutama melalui sekolah formal dalam suatu jangka waktu dan mendistribusikannya, sekarang dan kelak, di kalangan masyarakat” (Samuelson, 1961).

Terkait dengan biaya pendidikan, Thomas (1985) mengungkapkan adanya biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*), serta biaya masyarakat (*social cost*) dan biaya pribadi (*private cost*) (Imron, 2016).²

1. Biaya Langsung dan Tidak Langsung

Direct cost (biaya langsung) yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung akan berpengaruh terhadap output pendidikan. Biaya langsung terdiri atas biaya pembangunan dan biaya rutin. Biaya pembangunan ialah biaya yang digunakan untuk pembelian tanah bangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olah raga, konstruksi bangunan, serta penggantian dan perbaikan. Untuk menghitung besarnya biaya pembangunan digunakan konsep "capital cost per student place". Biaya pembangunan ini, terdiri atas tiga kelompok, yaitu untuk siswa di sekolah, asrama siswa, dan tempat tinggal guru.

Biaya rutin ialah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya rutin digunakan untuk menunjang pelaksanaan program belajar- mengajar, pembayaran gaji guru dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana. Untuk menghitung biaya rutin yang dibutuhkan seorang siswa per tahun di sekolah digunakan analisis unit *cost*.

Nilai unit *cost* merupakan nilai satuan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada seorang siswa per tahun dalam suatu jenjang pendidikan. Unit *cost* memberikan gambaran tentang besar biaya yang dikeluarkan dan tingkat pelayanan yang diberikan. Menghitung unit *cost* per siswa menurut Fatah (2000:26) dalam (Imron, 2016) adalah membagi jumlah biaya yang tersedia dalam program anggaran dengan jumlah kredit yang diambil siswa per tahun dari program tersebut. Biaya program pengajaran per jam menurut (Thomas, 1985) dalam (Imron, 2016) ditentukan oleh (1) gaji guru dan tenaga administrasi; (2) biaya ruang; (3) biaya perlengkapan dan alat; (4) biaya bahan pengajaran. *Indirect cost* (biaya tidak langsung) adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya.

² Imron, M. J. (2016). Manajemen Pembiayaan Sekolah. *Al Ibroh* .

2. Biaya Masyarakat dan Biaya Pribadi

Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya termasuk *social cost* (biaya masyarakat). Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa, dan termasuk di dalamnya *forgone opportunities* (biaya kesempatan yang hilang).

Berdasarkan pemaparan teori tentang Tagihan atas pembiayaan pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa tagihan atas pembiayaan pendidikan merupakan hak atau tuntutan terhadap pihak lain (orang tua) atas biaya pendidikan yang disepakati dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini yang masih menjadi problematika dalam pembiayaan pendidikan disekolah khususnya untuk sekolah swasta. SMA ULUL ALBAB merupakan salah satu sekolah yang ada di kabupaten Sidoarjo yang memiliki permasalahan terkait biaya pendidikan peserta didiknya setiap tahun pelajaraungkakan yang sering terjadi diantaranya biaya SPP, daftar ulang, dan uang pangkal. Jenis-jenis Besarnya tagihan siswa yang terjadi di tahun pelajaran 2017/2018 sebagai berikut :

No	Kelas	Besarnya tagihan
	X	Rp 26. 125. 000
	XI	Rp 56. 935. 000
	XII	Rp 8. 910. 000
Total		Rp 91. 970.000

Tabel 1 : data tagihan³

Tabel di atas di dokumentasikan dari data biaya rutin pembinaan Pendidikan (SPP). Tingginya tagihan biaya yang terjadi disekolah tersebut berdampak pada terkendalanya operasional pengembangan sekolah mengingat sebagai sekolah yang memiliki sistem full day school, jika tidak dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat maka berdampak negatif pada mutu sekolah yang dituntut selalu eksis setiap tahun berjalan.

³ Rizal.2018. analisis peranan pengendalian internal sekolah dalam upaya meminimalkan tagihan pembiayaan siswa di SMA ULUL ALB@B

Problematika tagihan peserta didik ini sebenarnya telah diminimalisir dengan adanya bantuan dana dari pemerintah. Salah satunya adalah bantuan operasional sekolah dengan harapan dapat meringankan sedikit beban peserta didik. Akan tetapi adanya bantuan tersebut belum signifikan dalam meminimalisir tagihan peserta didik yang selalu bertambah setiap bulannya.

Mengkaji dari problematika tagihan biaya peserta didik tersebut menggambarkan bahwa belum terwujudnya salah satu dari enam syarat mencari ilmu dalam kajian keislaman yaitu

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Karena menawarkan keluwesan yang tinggi dan memberikan kebebasan untuk mendapatkan informasi dari tangan pertama. Selain itu pada penelitian ini peneliti ingin menggali informasi, memahami pendapat informan, menganalisis, dan memberi usulan pemikiran tentang berbagai hal terkait dengan problematika tagihan peserta didik pada sekolah sekolah swasta. Sesuai dengan yang disampaikan Menurut Moleong (2000:4) bahwa pendekatan kualitatif dilakukan pada latar alamiah (natural setting) atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan secara mendalam fenomena yang ada, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan, rancangan, dan metode yang sesuai dengan maksud penelitian tersebut.

Penelitian ini dilakukan di SMA ULUL ALBAB. Penelitian ini fokus untuk menggali informasi, memahami, menganalisis pendapat informan tentang problematika Pembiayaan Pendidikan di lingkungan sekolah swasta.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya wawancara adalah kecenderungan penulis menggunakan teknik ini disebabkan oleh data yang diperoleh dari sejumlah informasi dalam memperoleh data serta bermanfaat guna mewujudkan validitas secara keseluruhan. Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan dimana saja termasuk di kantor informan. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Telaah Dokumen Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan sumber-sumber data sekunder lainnya yang dapat mendukung data-data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Observasi dilakukan dengan melakukan kegiatan pengamatan terhadap obyek peneliti untuk memperoleh

keterangan data yang akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan sumber-sumber data yang diperoleh dari telaah dokumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Problematika Pembiayaan Pendidikan di Lingkungan Sekolah Swasta

Masalah pendidikan di Indonesia ibarat benang yang kusut, sehingga ada kesulitan harus dari mana memulainya agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia bukan hanya karena sistem pendidikan, tetapi dapat diduga pula dikarenakan oleh para pelaku penyelenggara pendidikan itu sendiri. Akan tetapi permasalahan yang terjadi akhir – akhir ini adalah bukan lagi bukan terjadi mahalnnya biaya pendidikan karena biaya tersebut telah menjadi kesepakatan antara sekolah dengan orang tua. Namun problematika yang terjadi adalah tingginya angka tagihan biaya pendidikan yang tinggi dan berpengaruh pada *cost* dari operasional sekolahnya.

Menurut Firdaus (2001:145) bahwa Piutang adalah klaim dalam bentuk uang terhadap perusahaan atau perseorangan.” Pengertian Tagihan (Piutang) adalah sejumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan atas seluruh penggunaan atau pemakaian jasa dan fasilitas tertentu (biasanya dalam kurun waktu 1 bulan), termasuk jumlah denda, bunga, biaya administrasi serta biaya lain (apabila ada). Sedangkan menurut Mulyadi (2002:87) mengatakan bahwa. “Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan”. Berdasarkan kutipan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa piutang adalah hak atau tuntutan terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang penyelesaiannya dilakukan dengan penerimaan kas dalam jangka waktu kurang dari satu tahun periode akuntansi.

Pengertian dari pembiayaan pendidikan adalah sebagaimana yang diutarakan Nanang Fattah bahwa pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/*mobile*, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Ada tujuh konsep penting terkait dengan pembiayaan yang meliputi (1) objek biaya, (2) informasi manajemen biaya, (3) pembiayaan, (4) keuangan, (5) anggaran, (6) biaya, (7) pemicu biaya. Sehubungan dengan hal tersebut, satu hal yang merupakan konsep penting dalam pembiayaan pendidikan adalah masalah biaya pendidikan yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan pula bahwa pembiayaan pendidikan sesungguhnya adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sesuai dengan kondisi tagihan yang terjadi di salah satu sekolah di wilayah kecamatan Taman kabupaten sidoarjo. SMA ULUL ALBAB merupakan salah satu sekolah yang ada di kabupaten Sidoarjo yang memiliki permasalahan terkait biaya pendidikan peserta didiknya setiap tahun pelajaraunggakan yang sering terjadi diantaranya biaya SPP, daftar ulang, dan uang pangkal. Jenis-jenis Besarnya tagihan siswa yang terjadi di tahun pelajaran 2017/2018 sebagai berikut :

No	Kelas	Besarnya tagihan
	X	Rp 26. 125. 000
	XI	Rp 56. 935. 000
	XII	Rp 8. 910. 000
Total		Rp 91. 970.000

Tabel 2 : data tagihan (diolah sendiri)

Tingginya tagihan tersebut didasarkan dari data pembiayaan bulanan (SPP), Uang pembangunan dan Biaya daftar ulang. Hal ini tentu menjadi pembiayaan bermasalah yang dihadapi sekolah tersebut dalam mengelola pengeluaran setiap tahun berjalan. Terhambatnya pengelolaan pengeluaran yang terjadi tentunya terhambatnya operasional sekolah setiap bulannya terkait dengan gaji guru dan karyawan.

Sesuai dengan hasil pendekatan yang telah dilakukan antara sekolah dan orang tua dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan bahwa beberapa faktor yang mendasari terjadinya tagihan pada pembiayaan siswa diantaranya:

1. Kondisi keuangan keluarga

Orang tua merupakan sumber keuangan yang digunakan untuk memnuhi pembayaran seorang peserta didik kepada sekolah. Beragam kondisi keluarga yang ada disebuah sekolah sehingga beragam pula jumlah tagihan yang beum dibayarkan oleh masing – masing siswa disekolah tersebut. Sesuai dengan kondisi yang terjadi di SMA ULUL ALB@B taman yang merupakan lokasi penelitian ini bahwa kondisi keuangan orang tua yang mensekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Keberagaman tersebut meliputi jumlah penghasian dan jenis usaha orang tua. Orang tua yang kedua bekerja mayoritas mampu memenuhi jumlah biaya sekolah anaknya namun sebaliknya orang tua yang bekerja salah satu beberapa belum mampu membayar jumlah tagihan yang harus dibayarkan.

Pada tahun 2017/2018 meningkatnya jumlah tagihan jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya menurut hasil wawancara yang dilakukan bahwa banyaknya orang tua yang mengeluhkan kondisi perekonomian saat ini yang pasang surut yang berdampak pada kelancaran membayar biaya yang harus dibayarkan. Bagaimanapun keadaan yang terjadi tagihan yang telah ditentukan sekolah sudah menjadi kewajiban orang tua untuk dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh orang tua dengan sekolah.

2. Banyaknya jumlah tanggungan di keluarga

Tidak semua kondisi keuangan orang tua minim karena berdasarkan data yang diterima sebagian besar orang tua di sma ulul ALB@B merupakan pegawai dan TNI POLRI sehingga bukan menjadi alasan bahwa kondisi keuangan menjadi maslah. Hal lain yang menjadi kendala dalam menyelesaikan tagihan adalah jumlah tanggungan pada keluarga tersebut. Sesuai dengan kondisi tersebut menurut penuturan bagian tata usaha menyampaikan alasan orang tua adalah membagi penghasilannya untuk pembayaran tagihan disekolah lain.

3. Keadaan pekerjaan orang tua

Pekerjaan merupakan sumber penghasilan yang digunakan orang tua untuk mampu membayar sejumlah tagihan yang telah ditentukan oleh sekolah. Namun permasalahan muncul jika pekerjaan tersebut hilang atau menurun. Beberapa alsan orang tua jika memenuhi panggilan sekolah terkait jumlah tagihan yang belum terbayar ialah sebagian besar menyampaikan perusahaan sedang pengurangan pegawai sehingga banyak pengangguran baru dan dalam tahap penyesuaian penghasilan. Belum lagi adanya orang tua yang meninggal salah satunya sehingga mempengaruhi keuangan keluarga.

Berdasarkan beberapa faktor di atas dapat disimpulkan bahwa tingginya tagihan dipengaruhi oleh kondisi orang perekonomian orang tua yang relatif tidak stabil. Namun diantara Problematika di atas sebenarnya dekolah swasta memiliki problematika lain yang dihadapi oleh sekolah swasta seperti SMA ULUL ALBAB di atas adalah adanya himbauan dari pemerintah bahwa sekolah tidak diperbolehkan mempersulit dalam pemenuhan hak dari siswa seperti ijazah, siswa harus mendapatkan pembelajaran yang bermutu tanpa pengecualian.

Kondisi dilematis ini menjadi problematika yang belum dapat diikuti oleh sekolah swasta khususnya kasuistika penahanan ijazah peserta didik. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa sekolah bukan seperti lembaga perbankan ketika terjadi pembiayaan bermasalah pada nasabahnya. Sebagai lembaga pendidikan tidak ada lagi jaminan yang bisa dijadikan alat untuk orang tua dapat memenuhi pembiayaan yang belum diselesaikan kecuali dengan penahanan ijazah.

Sebenarnya sekolah telah mengupayakan untuk dapat meminimalisir problematika yang terjadi dengan beberapa hal diantaranya pembentukan pengendali internal sekolah dan pendekatan secara personal dengan orang tua wali peserta didik agar problem yang terjadi dapat di atasi sedikit demi sedikit.

Konsep Pengendalian Intern di lingkungan Pendidikan

Menurut Mulyadi (2013:6) pengendalian intern adalah bagian dari sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016). Konsep pengendalian intern di dunia pendidikan merupakan konsep yang berbeda ketika diterapkan pada perusahaan – perusahaan atau lingkungan diluar pendidikan.⁴

Perbedaan tersebut meliputi langkah dan tujuannya. Di organisasi diluar pendidikan pengendalian intern dilakukan untuk mewujudkan organisasi yang teliti baik dari segi sumber daya manusia maupun managemennya. Tujuan adanya pengendalian intern didalam organisasi diluar pendidikan adalah sebagai lembaga kontrol dibawah top manajemen sehingga upaya meminimalisir terjadinya kendala yang disebabkan oleh internal organisasi bisa dengan mudah di atasi atau dikendalikan. Hal ini digambarkan dalam penelitian yang

⁴ Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jogjakarta: Salemba Empat
845

dilakukan oleh Sischa Dwiyani (2018) bahwa pengendalian intern dibentuk di perusahaan jasa *Freight Forwarding* PT. Speedmark Logistik Indonesia Surabaya disebabkan karena adanya beberapa permasalahan salah satunya adalah Inefisiensi proses pembuatan tagihan menjadi tertunda atau mempengaruhi lamanya proses pembuatan *Invoice*⁵. Sesuai dengan gambaran di atas menunjukkan bahwa pengendalian intern di perusahaan PT Speedmark tersebut digunakan untuk mewujudkan manajemen yang efisien dalam pelaksanaan pembuatan invoice sebagai layanan jasa pengiriman barang.

Sedangkan konsep pengendalian intern di lingkungan pendidikan digunakan sebagai alternatif penyelesaian problematika dengan orang tua peserta didik terkait dengan tingginya tagihan biaya pendidikan yang mempengaruhi keberlangsungan operasional suatu lembaga pendidikan. Mengingat lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial yang bekerja secara optimal dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai dengan observasi dan pendalaman penelitian yang dilakukan di sekolah swasta peran pengendalian intern bukan pada akuntansi keuangan yang diterapkan akan tetapi lebih pada pengendalian pembiayaan bermasalah atas biaya pendidikan yang sangat tinggi. Menurut Romey dan Steinart (2009:229) dikutip dari Pujiani (2015:107) bahwa pengendalian internal mempunyai tiga fungsi penting yang meliputi :

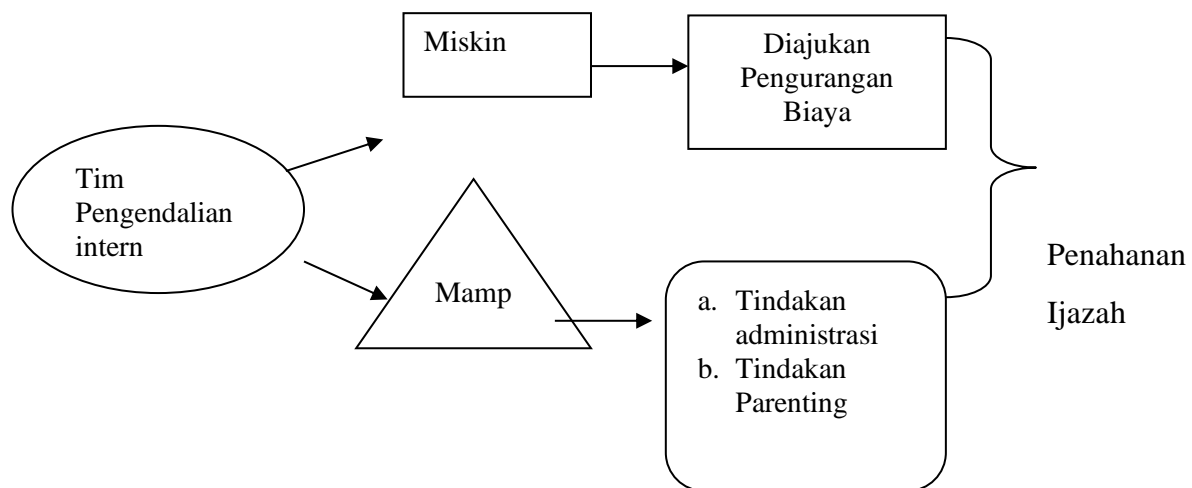
- a. Pengendalian untuk pencegahan (*preventive control*), dicegah untuk mencegahnya timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. Misalnya : Memperkerjakan personil akuntansi yang berkualitas tinggi, pemisahan tugas, pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas asset, fasilitas dan informasi. Berdasarkan pengertian di atas dalam pelaksanaan yang dilakukan di SMA ULUL ALBAB tim pengendalian intern memiliki tugas pokok dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan tunggakan dari biaya yang seharusnya wajib dibayarkan oleh orang tua. Jadi, didalam melaksanakan tugas tim pengendalian intern melakukan dokumentasi untuk melakukan kajian terhadap kondisi keuangan yang berasal dari pembayaran rutin orang tua seperti SPP setiap bulannya. Upaya pencegahan yang dilakukan tim pengendalian intern adalah untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada bulan berikutnya.

⁵ Sischa Dwiyani.2018. sistem informasi akuntansi piutang pada perusahaan jasa *Freight Forwarding* PT. Speedmark Logistik Indonesia

- b. Pengendalian untuk pemeriksaan (*detective control*), dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul. Misalnya pengendalian untuk pemeriksaan adalah pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan. Pengendalian yang kedua ialah tim pengendalian intern sebagai bahan pemeriksaan sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi di bank atau lembaga lain selain pendidikan. Seperti telah dijabarkan di awal bahwasanya pemeriksaan sebatas memeriksa uang yang masuk dan tunggakan biaya peserta didik. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji seberapa besar kebutuhan operasional sekolah yang tertera dalam RAPBS dengan pemasukan yang diterima sekolah sesuai dengan dasar tersebut tim dapat menentukan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada orang tua yang memiliki pembiayaan bermasalah kepada sekolah.
- c. Pengendalian korektif (*corrective control*), dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditemukan, dan mengubah sistem agar masalah dimasa mendatang dapat diminimalisir atau dihilangkan. Merujuk pada pengertian di atas dokumentasi yang sebelumnya telah dilakukan (data pembiayaan dan pembiayaan bermasalah atas biaya rutin peserta didik) tim melakukan identifikasi atas kondisi ekonomi orang tua yang memiliki pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar prosedur tindakan tepat sasaran. Didalam pelaksanaannya tim melakukan koordinasi dengan wali kelas, kesiswaan dan kepala sekolah. Pentingnya koordinasi tersebut sebagai langkah hierarkis di sekolah. Di SMA ULUL ALBAB sesuai dengan pengamatan yang dilakukan prosedur tindakan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu identifikasi peserta didik dalam kondisi ekonomi kurang mampu dan identifikasi peserta didik dalam kategori ekonomi mampu namun memiliki pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan 3 fungsi pengendalian intern tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tim tersebut memiliki tugas pokok yaitu pencegahan, pemeriksaan, dan koreksi. Sesuai dengan fungsi tersebut tim dapat mengukur keberhasilan atas kinerja yang dilakukan guna meminimalisir tagihan biaya pendidikan peserta didik yang terjadi.

Prosedur tindakan disampaikan pada Gambar 1 dibawah ini :



Sesuai dengan Gambar 1 diatas menggambarkan bahwa prosedur tindakan pengendalian intern terbagi pada 3 aspek yaitu pengurangan atas biaya pendidikan, tindakan administrasi dan tindakan parenting.

Sesuai gambaran alur tindakan di atas upaya yang telah dilakukan tim diantaranya :

1. Pengurangan Biaya Pendidikan
SMA memiliki
2. Pengendalian intern administratif

Struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern administrative meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapatkan dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.

Peranan pengendalian internal dalam upaya meminimalkan tagihan pembiayaan siswa di SMA ULUL ALB@B diantaranya :

1. Pemberitahuan tertulis

Upaya meminimalkan jumlah tagihan pembiayaan siswa dilakukan oleh tim pengendalian internal yaitu pemberitahuan secara tertulis kepada orang tua diantaranya :

- a) Surat pemberitahuan pada saat akan dilaksanakan Ujian tengah Semester 1.

Pada pemberitahuan pelaksanaan ujian tengah semester disampaikan syarat administrasi pembiayaan harus selesaisampai dengan bulan september. Bagi siswa yang masih memiliki tagihan pembiayaan belum terbayar maka akan diberikan surat pemberitahuan jumlah tagihan tersebut beserta tanggal jatuh tempo pelunasan.

- b) Surat pemberitahuan pada saat akan dilaksanakan Ujian akhir Semester 1

Pada pemberitahuan pelaksanaan ujian tengah semester disampaikan syarat administrasi pembiayaan harus selesaisampai dengan bulan Desember. Bagi siswa yang masih memiliki tagihan pembiayaan belum terbayar maka akan diberikan surat pemberitahuan jumlah tagihan tersebut beserta tanggal jatuh tempo pelunasan Akhir Desember.

2. Pemanggilan secara tertulis

Surat pemanggilan orang tua ini disampaikan kepada orang tua yang belum bisa menyelesaikan tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Tujuan diterbitkannya surat pemanggilan tersebut bertujuan untuk mengetahui kendala orang tua dalam pembayaran tagihan tersebut. Dengan adanya komunikasi yang dijalin antara sekolah dan orang tua. Pihak sekolah dapat menentukan langkah strategis menyelesaikan persoalan tagihan belum terbayar tersebut.

3. Pengajuan surat pernyataan

Surat pernyataan ini merupakan langkah strtegis dalam upaya penagihan yang dilakukan sekolah kepada orang tua yang memiliki tagihan. Sesuai dengan hasil komunikasi yang terjalin. Orang tua dengan pihak sekolah (kepala sekolah) menjalin kesepakatan untuk menentukan tanggal jatuh tempo pelunasan atas tagihan yang disampaikan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kesimpulan

1. Beberapa faktor yang mendasari terjadinya tagihan pada pembiayaan siswa diantaranya : Kondisi keuangan keluarga, Banyaknya jumlah tanggungan di keluarga, Keadaan pekerjaan orang tua.
2. Peranan pengendalian internal dalam upaya meminimalkan tagihan pembiayaan siswa di SMA ULUL ALBAB diantaranya Pemberitahuan tertulis, Pemanggilan secara tertulis, Pengajuan surat pernyataan.
3. Prosedur tindakan pengendalian intern terbagi pada 3 aspek yaitu pengurangan atas biaya pendidikan, tindakan administrasi dan tindakan parenting

b. Saran

1. Pihak sekolah harusnya melihat kondisi perekonomian siswa sehingga untuk siswa yang kurang mampu perekonomiannya tagihan pembiayaan ada potongan 50 % untuk meringankan beban orangtua siswa.
2. Untuk siswa yang berprestasi dan berasal dari keluarga yang perekonomiannya kurang mapu harusnya ada beasiswa khusus atau gratis untuk pembiayaan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Fauzi, M. A. (2017). Membangun Parenting Trust Sebagai Eksistensi Sekolah Unggul di Lingkungan Sekolah Berbasis Masyarakat (Studi : SMA Ulul Alb@b Taman Kabupaten Sidoarjo). *AT-TAJDID : Jurnal Ilmu Tarbiyah* , 271-293.

Imron, M. J. (2016). Managemen Pembiayaan Sekolah. *Al Ibroh* .

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jogjakarta: Salemba Empat.